

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL
KECAMATAN DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD ALWI HILMI

NPM : 1803100031

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA

UTARA MEDAN

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD ALWI HILMI**

NPM : 1803100031

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Jumat , 07 Oktober 2022

Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos.M.Si**


(.....)

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si**


(.....)

PENGUJI III : **SYAFRUDDIN.S.Sos.,M.H**


(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH,S.Sos.,M.Si


Dr. ABRAR ADHANI,S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD ALWI HILMI**

NPM : 1803100031

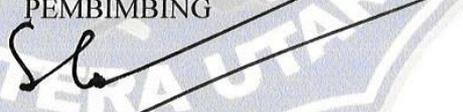
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL KECAMATAN DOLOK
MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Medan, Oktober 2022

PEMBIMBING


SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, MUHAMMAD ALWI HILMI 1803100031 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 07 Oktober 2022
Yang Menyatakan




MUHAMMAD ALWI HILMI

1803100031

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MUHAMMAD ALWI HILMI

1803100031

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk dari sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Menurut Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2020 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai” Pasal 6 menyatakan bahwa Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penlitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat batas implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Hasil dari penelitian ini akan menyelesaikan permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan Kesehatan, Kekuatan dan Nikmat Rezeki dimana sampai pada saat ini masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan pada upaya menyelesaikan tugas tahap akhir dalam program pendidikan sarjana pertama. Pada saat ini saat yang sangat ditunggu oleh penulis untuk menyelesaikan dengan seizin Allah SWT. akhirnya telah menyusun tugas akhir yang disebut Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL KECAMATAN DOLOK
MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermamfaat untuk pembagunan kedepannya di bidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan pendidikan Strata-1 (S1) di Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Arwinskyah Ara dan Ibunda tercinta Wahyuni Sugi yang telah membesarkan

serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta Negara.

2. Bapak Husnul Arifin S.H selaku Lurah Kelurahan Pekan Dolok Masihul.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Sp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.Sp selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Hj. Yusrina Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H. Selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membantu penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi

dan banyak membantu penulis.

11. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
12. Kepada abang kandung saya Muhammad Alwan Hilmi dan Adik kandung saya Ade Rizky Syahputra yang telah memberikan bantuan material dan moril hingga selesainya skripsi ini
13. Kepada saudara-saudara saya terdekatku Arni fauziah nur S.Pd, Azridessyuci Putri Zahrul, S.E.sy, Azrimarisya Putri Zahrul S.H, Bima Sholly Taroji, S.H
14. Kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2022

Penulis

Muhammad Alwi Hilmi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penelitian	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Implementasi	8
2.1.1 Unsur-Unsur Implementasi	14
2.1.2 Variabel Kinerja Implementasi	17
2.1.3 Teori-Teori Implementasi	18
2.2 Kebijakan	21
2.2.1 Kebijakan Menurut Para Ahli	22
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	23
2.4 Ketentraman	27

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Kerangka Konsep	32
3.3 Definisi Konsep	32
3.4 Kategorisasi Penelitian	33
3.5 Narasumber	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.9 Ringkasan Objek Penelitian	36
3.9.1 Informasi Kelurahan Pekan Dolok Masihul	36
3.9.2 Visi dan Misi Kelurahan Pekan Dolok Masihul	38
3.9.3 Bagan Struktur Kelurahan Pekan Dolok Masihul	39
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 40
4.1 Deskripsi Narasumber	40
4.2 Hasil Penelitian	40
4.2.1 Adanya Implementasi untuk mencapai suatu tujuan kelompok	41
4.2.2 Adanya kebijakan yang ditetapkan untuk masyarakat Kelurahan Pekan Dolok Masihul	42
4.2.3 Adanya upaya kebijakan yang ditetapkan untuk masyarakat Kelurahan Pekan Dolok Masihul	42
4.3 Pembahasan	43
4.3.1 Adanya upaya implementasi untuk mencapai suatu kelompok	46

4.3.2 Adanya upaya kebijakan yang ditetapkan untuk masyarakat Kelurahan Pekan Dolok Masihul	48
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	40
-----------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep	32
Gambar 3. 2 Kantor Kelurahan Pekan Dolok Masihul	38
Gambar 3. 3 Bagan Struktur Kelurahan Pekan Dolok Masihul	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK – 1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK – 4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
- Lampiran IX : SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran X : SK – 6 Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XII : SK – 10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi masyarakat Indonesia secara fisik, ekonomi dan sosial saat ini belum sepenuhnya mencapai kesejahteraan, hal ini dibuktikan bahwa masih adanya ketimpangan. Masih banyak penduduk miskin, masih banyak pengangguran dan masih banyak daerah tertinggal. Hal ini menjadi tugas besar yang perlu diselesaikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberikan amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Peran pemerintah daerah sebagaimana telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat guna menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, sudah semestinya bertanggung jawab atas daerahnya masing-masing dengan melakukan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna mencapai masyarakat yang sejahtera. Betapa pentingnya peran dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan aspek sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan, tidak hanya pembangunan fisik lingkungan saja, akan tetapi lebih kepada memberikan dorongan/akses agar masyarakat ke depannya lebih mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses dan upaya untuk membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk dari sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentu banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan dalam ketrampilan membuat home industry, serta kemampuan dalam berbagai bidang lainnya. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan.

Menurut Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2020 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai” Pasal 6 menyatakan bahwa Kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kelurahan ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai dengan norma-norma yang ada.

Keamanan dan ketertiban merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan dalam mendukung terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum serta segala aktivitas masyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang menjadi harapan utama seluruh masyarakat sehingga meningkatnya ketenangan dan ketentraman masyarakat serta semangat motivasi bekerja bisa terwujud. Tidak ada rasa takut karena kemungkinan adanya gangguan. Ketentraman dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk polisi sebagai aparat penegak hukum. Dalam implementasinya, polisi melakukan upaya/tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan operasional kepolisian, baik rutin maupun spesifik.

Program ini sudah lama dilaksanakan, meskipun di beberapa Kelurahan sudah berhasil dalam melaksanakan program ini tapi ada beberapa-beberapa kelemahan yang perlu dibenahi, misalnya sistem keikut-sertaan pelatihan yang

diadakan, jumlah dana pinjaman untuk modal usaha, maupun pengguna dana pinjaman untuk modal.

Salah satu program pemberdayaan ini adalah dengan memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat, program ini disebut dengan Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu terjadi dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena kemiskinan dapat menghambat program pembangunan. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini melalui program peningkatan ekonomi masyarakat yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Program ini menjadihal yang harus segera dilaksanakan, dengan meningkatnya perekonomian maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Salah satu program yang dilakukan dalam percepatan peningkatan ekonomi adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam program pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan kelurahan yang merupakan salah satu wujud nyata dari percepatan pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, program ini berlandaskan kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/ SJ tentang pedoman alokasi dana sharing dari Pemerintah Kabupaten Kota kepada Desa/ Kelurahan pada tanggal 22 Maret 2005. Adapun proses kegiatan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya,

merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.

2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat deswkelurahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dalam kesempatan ini peneliti tertarik mengupayakan kajian ilmiah dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekan Dolok Masihul ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

- a. Aspek Teoritis, Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Dolok Masihul.
- b. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah alat salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian Implementasi, pengertian Kebijakann, pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informerr narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian dilapangan dan pembahasan dari hasil penelitian. BAB V PENUTUP Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Implementasi

Grindle (1980:7) Pengertian implementasi bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Grindle (1980:6) bahwa suatu implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas implementasi mencakup terbentuknya “ *a policy delivery system* ” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Keberhasilan implementasi menurutnya juga dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.

- b. jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- c. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. apakah letak sebuah program sudah tepat.
- e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
- f. sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- g. karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- h. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan menyatakan bahwa aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Abdul Wahab Sehubungan dengan kata implelementasi sebagaimana dikutip dalam Tahir (2008:55) bahwa “ Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula

terbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuansasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Nugroho (2003) bahwa implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dan mencapai tujuannya.

Islamy (2001), bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Terdapat beberapa kebijakan yang bersifat *self executing* artinya dengan dirumuskannya kebijakan sekaligus (dengan sendirinya) kebijakan itu terimplementasikan.

Mahardika, A., & Rizki, (2021) menyangkut semua upaya yang harus dipenuhi untuk merealisasikan isi kebijakan kedalam tindakan yang nyata, terencana, sistematis, dan mengarah pada pencapaian tujuan.

Mulyadi (2016), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Syaukani, (2015) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Syahida, Agung, (2014), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap

sesuatu”.

Naditya, Suryono, (2010) menyatakan, “Dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.

Pendapat dari Yusriati, (2016) implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.

Van Meter dan Van Horn Agustino, (2008) mendefenisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

Nugroho, (2016) Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik.

Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai

peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan dan instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan.

Implementasi kebijakan dari suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan serangkaian implementasi yaitu misi, visi, strategi dan cara, kebijakan, program, proyek dan kegiatan yang menghasilkan umpan balik.

Nugroho (2016) menyatakan misi adalah yang pertama karena melekat pada organisasi sebagai wujud dalam menghadirkan atau mengeksekusi sebuah kebijakan. Misi yang menentukan kemana arah dari suatu visi yang melekat dalam suatu organisasi. Dari visi inilah lahir sebuah strategi yang membawa suatu organisasi mengembangkan implementasi kebijakannya yang sejalan dengan program proyek dan kegiatannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu implementasi kebijakan yang diterakan dalam suatu organisasi mulai dari misi sampai pada pemanfaatan dari suatu proses yang memerlukan adanya umpan balik. Pada prinsipnya implementasi merupakan aktivitas yang berdasar pada rumusan kebijakan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan kegiatan. Ini untuk menegaskan sesuai dengan desain struktur proses implementasi.

Dalam inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah kebijakan dibuat sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Untuk dapat mewujudkan langkah tersebut maka,

diperlukan adanya implementasi kendali yang kemudian dievaluasi. Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

Sementara Winarno, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Pengertian yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Wahab sebagai berikut: "Implementasi adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya tergabung dalam undang-undang, tetapi yang juga dapat mengambil ordess eksekutif penting atau keputusan pengadilan. Idealnya keputusan yang mengidentifikasi masalah yang akan ditangani, menetapkan tujuan untuk dikejar, dan dalam berbagai cara, "tructures" proses implementasi. Proses biasanya

berjalan melalui beberapa tahap dimulai dengan berlalunya undang-undang dasar, diikuti oleh output kebijakan (keputusan) dari Lembaga pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran dengan orang-output, dampak yang dirasakan keputusan lembaga, dan akhirnya revisi penting (Hasil revisi undang-undang dasar)”.

2.1.1 Unsur-unsur implementasi kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur:

1. Proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan.
3. Hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Menurut Abdullah dan Smith Tachjan, (2006), unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah:

1. Unsur Pelaksana

Tachjan, (2006) Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Smith menyebutnya dengan istilah “implementing organization”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

Hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley & Grace A. Franklin (dalam Tachjan, 2006) bahwa: *“Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”*.

Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan.

2. Program

Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle Tachjan, (2006) bahwa: *“Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”*.

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuamsasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. Sehubungan dengan program ini, Terry Tachjan, (2006) mengemukakan bahwa:

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets”.

Maksudnya, bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, dan budge

3. Target Group

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti: besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosialekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas

implementasi.

Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara.

Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

2.1.2 Variabel Kinerja Implementasi

Meter dan Horn dalam subarsono (2006) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompokkelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.1.3 Teori-teori implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Berikut disini ada sedikit info tentang pengertian implemtasi menurut para ahli. Subarsono mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan.

1. Teori George C. Edward dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :
 - a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi impementasi.
 - b) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
 - c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala

menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Edward III, (1980) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Õagmentasi.

2. Teori Charles O. Jones Tidak terlepas dari teori yang dikemukakan oleh George Edward, yang menyatakan bahwa ada beberapa variabel atau yang sering disebut faktor-faktor yang berpengaruh implementasi kebijakan, maka dalam hal implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Dimana dalam aktivitas inilah nantinya faktor-faktor yang dalam teori George C Edward III memberikan sumbangsi atau pengaruh yang sangat signifikan. Aktivitas pertama yang dimaksud adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang

mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

2.2 Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam bahasa Indonesia.

Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang dikemukakan oleh Suharto, bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan.

Elau dan Prewitt (1973) dalam buku Edi Suahrto, kebijakan adalah Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsistensi dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu.

2.2.1 Kebijakan Menurut Para Ahli

Jenkins menyebutkan bahwa kebijakan negara (public policy) adalah “*a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving the within a spesified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batasbatas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut.

Siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah sebagaimana dilakukan oleh Dunn menunjukkan bahwa suatu kebijakan disusun dari adanya masalah kebijakan yang dituangkan dalam rumusan masalah kebijakan.

Carl Friedrich Dwiyanto (2009) menyatakan bahwa Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah

adanya tujuan (goal), sasaran (objective) atau kehendak (purpose).

Jones dalam Nawawi (2007) kata kebijakan sering digunakan dan diperuntukkan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud besar tertentu. Selanjutnya Jones mendefinisikan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kebijakan (Policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan secara umum Abidin (2004) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang- undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Syafrizal (2020) Pemberdayaan masyarakat sebagai proses di mana orang

atau sekelompok orang secara aktif dan terlibat dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi dan mampu membuat keputusan dalam menghadapi berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan mereka untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam perencanaan, pengembangan dan pemberian layanan serta mengambil tindakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Teguh (2015) mengungkapkan arti pemberdayaan sebagai berikut, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga, upaya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Selain itu pemberdayaan juga berasal dari bahasa Inggris "empower" yang menurut Marriam Webster dan Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian yaitu to give power or authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain sedangkan pengertian yang kedua yaitu to give ability to or enable atau upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Mas"oed dalam Mardikanto, (2010) "Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan kepada masyarakat". Parsons, et al dalam Mardikanto (2010) mengartikan pemberdayaan sebagai berikut: Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan adalah sebuah 'proses menjadi' bukan sebuah "proses instansi'. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai 3 tahap yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Pemberdayaan pada akhirnya bukanlah sekedar teori sebagaimana dikatakan Johnson dan Redmod (the art of empowerment,1992) bahwa at last, empowerment is about art. It is about value we believe. Tatkala pemberdayaan menjadi salah satu praktek dan seni, yang mengemukakan adalah bagaimana memejemini proses pemberdayaan, artinya pemberdayaan tidak boleh bermakna "merobotkan" atau "menyeragamkan". Pemberdayaan juga memberikan ruang pada pengembangan keberagaman kemampuan manusia yang beragam, dengan asumsi satu sama lain akan melengkapi. Pemberdayaan merupakan proses alamiah.

Pemberdayaan merupakan konsep kehidupan proses alamiah, kehidupan itu perlu dan harus di manjemeni. Konsep manajemeni berbeda dengan rekayasa karena manajemen lebih fokus pada meningkatkan nilai tambah suatu aset. Jadi pemberdayaan bukanlah semata mata konsep politik melainkan pada konsep suatu manajemen dan pada akhirnya pemberdayaan akan mempunyai indikator akan keberhasilan.

Syafrizal (2020) Pemberdayaan masyarakat memiliki konsep dasar sebagai dasar dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat. Istilah konsep merupakan generalisasi suatu gagasan atau gambaran mental yang dinyatakan sebagai simbol atau kata. Konsep dapat juga diasumsikan sebagai komponen dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Definisi konsep yaitu penyusun utama dalam filsafat pemikiran manusia dan pembentukan pengetahuan ilmiah.

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, yang artinya suatu yang telah dimengerti. Konsep merupakan penjabaran dari suatu gagasan atau gambaran mental yang diasumsikan menjadi simbol atau kata.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkup kehidupan bersama untuk melakukan pembangunan dalam yang terarah. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan.

Kartasmita pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Syafrizal (2020) Tujuan pemberdayaan adalah melatih masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan agar mampu mandiri untuk keluar dari kesenjangan, kemiskinan dan ketidakberdayaan. Indikator kemiskinan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Indikator keterbelakangan yaitu rendahnya produktivitas dan sumberdaya manusia yang lemah.

2.4 Ketentraman

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang menurut Poerwadarminta (2016) adalah “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana

dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenang.

Badudu dan Zain (2010) mendefinisikan bahwa “Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa : “Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana

alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).”

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu

wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, bahwa ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya :

- a. Pelanggaran hukum yang berlaku.
- b. Bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisme lainnya.
- c. Faktor Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penggambaran fenomena dilakukan dengan menggali data yang bersifat kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang ini, berdasarkan fakta-fakta.

Sugiyono, (2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

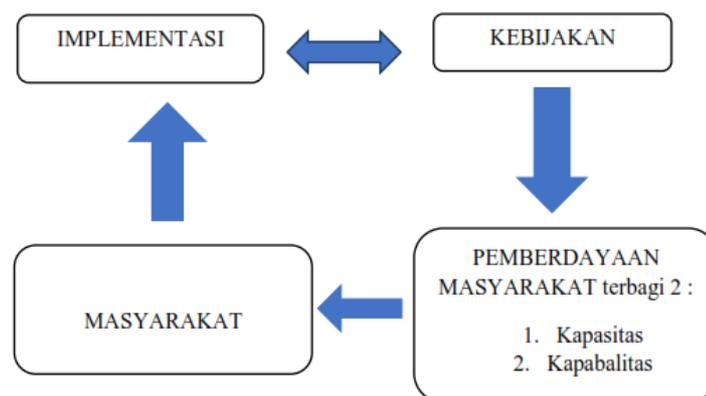
Sugiyono, (2017)) deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampe yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimana data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi kata-kata gambar bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya metode kualitatif yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang bedagai, dimana kerangka konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah tersusun dan dana telah siap dan

disalurkan untuk mencapai sasaran.

2. Kebijakan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.
3. Pemberdayaan Masyarakat upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian penunjang untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi penelitian ini adalah:

1. Adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan kelompok.
2. Adanya kebijakan yang ditetapkan untuk masyarakat kelurahan pekan Dolok Masihul.
3. Adanya Pemberdayaan Masyarakat dalam ketentraman Kelurahan Pekan Dolok masihul.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

1. Lurah Pekan Dolok Masihul

Nama : Husnul Arifm S.H

Umur : 56 Tahun

Pendidikan : Sarjana Hukum

Alamat : Desa Tegal Sari

2. Kepala Seksi Kentetraman dan Ketertiban

Nama : Muhammad Aidil Fitriyah S.E

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : Sarjana Ekonomi

Alamat : Lingkungan I Kelurahan Pekan Dolok Masihul

3. Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan(LPMK)

Nama : Hamdani S.Pd

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : Sarjana Pendidikan

Alamat : Lingkungan VII Kelurahan Pekan Dolok Masihul

4. Masyarakat Kelurahan Dolok Masihul Tokoh Masyarakat Kelurahan
Pekan Dolok Masihul

Nama : Ir. Ishak Jangga Wirana

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : Strata 1

Alamat : Lingkungan II Kelurahan Pekan Dolok Masihul

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab, serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Proses analisis data yang dilakukan melalui tahapan reduksi data (merangkum), penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Informasi Kelurahan Pekan Dolok Masihul

Kelurahan Pekan Dolok Masihul berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Dolok Masihul adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatra Utara, Indonesia. Sebelumnya, kecamatan ini berada di Kabupaten Deli Serdang hingga pada 7 Januari 2004 menjadi salah satu dari 11 Kecamatan yang dimekarkan menjadi Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Kecamatan Dolok Masihul pada mulanya pada tahun 1945 s/d 1963 adalah Kewedanaan Bedagai, yang mana kepala Pemerintahannya hanya disebut Asisten Wedana, setelah Kewedanaan dihapus pada tahun 1963, maka Pemerintah Wilayah Kecamatan Dolok Masihul langsung di bawahi oleh Bupati KDH Tk-II Deli Serdang yang mana pada saat ini Kecamatan Dolok Masihul diwilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang baru dimekarkan sesuai dengan Undang-undang Nomor : 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya Kecamatan Dolok Masihul dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yakni : Kecamatan Dolok Masihul dan Kecamatan Serba Jadi sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Nomen Klatur Kecamatan Bangun Purba menjadi Kecamatan Silindak dan Kecamatan Galang

menjadi Kecamatan Serba Jadi.

Pusat pemerintahan Kecamatan Dolok Masihul berada di Kelurahan Pekan Dolok Masihul . Kecamatan Dolok Masihul memiliki 27 Desa dan 1 Kelurahan dan setiap Desa dan Kelurahan memiliki Dusun dan Lingkungan (untuk Kelurahan) sehingga jumlah Dusun dan Lingkungan sebanyak 111 Dusun dan 8 Lingkungan.



Gambar 3. 2 Kantor Kelurahan Pekan Dolok Masihul

3.9.2 Visi dan Misi Kantor kelurahan Pekan Dolok Masihul

VISI

“Terwujudnya pelayanan terbaik menuju masyarakat yang partisipatif”

MISI

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan berlaku.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana

yang ada di kelurahan Pekan Dolok Masihul.

3. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang partisipatif.
4. Meningkatkan fungsi dan peran Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan Pekan Dolok Masihul.

3.9.3 Bagan Struktur Kelurahan Pekan Dolok Masih



Gambar 3. 3 Bagan Struktur Kelurahan Pekan Dolok Masihul

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan tempat keamanan (Pos Kamling), sehingga dapat memudahkan dalam pendeskripsian berdasarkan objek penelitian.

1. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	4	100%
2	Perempuan	0	0%
	Jumlah	4	100%

Sumber Analisis: Peneliti 2022

4.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis

diantaranya: peneliti diawali dengan menjawab permasalahan yang akan dijawab, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan empat orang informan penelitian yang terdiri dari Lurah Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban, Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Masyarakat.

Wawancara dilakukan memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa pernyataan dari informan mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah penyajian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara yang telah berlangsung di Kelurahan Pekan Dolok Masihul yang menjadi jawaban atas fenomena yang telah disebutkan oleh penulis.

4.2.1 Adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Husnul Arifin selaku Lurah Kelurahan Pekan Dolok Masihul pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di jam 10.15 WIB. Beliau mengatakan bahwa adanya upaya yang dilakukan Kantor Lurah Kelurahan Pekan Dolok Masihul dalam mencapai tujuan implementasi yaitu membuat Pos Kamling untuk ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan Kelurahan Pekan Dolok Masihul. Untuk kegiatan ini penunjang pada saat ini belum diterapkan sesuai dengan kebijakan berlaku. Kegiatan ini masih belum dilaksanakan oleh masyarakat sekitar.

4.2.2 Adanya kebijakan yang ditetapkan untuk masyarakat Kelurahan Pekan Dolok Masihul

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Muhammad Aidil Fitrisyah selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 13.40 WIB Beliau mengatakan bahwa dukungan dari sarana dilakukan oleh Pemerintahan Kelurahan Pekan Dolok Masihul menyediakan fasilitas Pos Kamling disetiap Lingkungan tempat untuk menjaga, tempat istirahat bagi penjaga malam setelah patrol keliling lingkungan dan juga fasilitas peralatan khusus seperti Penerangan (senter), Pentungan Alaram. Sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintahan Kelurahan Pekan Dolok Masihul belum terlaksana.

4.2.3 Adanya Pemberdayaan Masyarakat dalam ketentraman Kelurahan Pekan Dolok masihul

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Hamdani selaku Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 dijam 11.40 WIB . Beliau mengatakan bahwa program kegiatan ketentraman masyarakat lingkungan Kelurahan Pekan Dolok Masihul yang berupa Pos Kamling pada setiap lingkungan yang belum di terapkan akan membuat kegiatan tersebut terlaksana dengan cara menyampaikan program kegiatan ketentraman kepada setiap kepala lingkungan Kelurahan Pekan

Dolok masihul agar ketenteraman masyarakat lingkungan Kelurahan Pekan Dolok Masihul terjaga dengan baik.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Adanya upaya pencapaian dalam tujuan implementasi suatu kelompok

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 Dijelaskan, tugas kepala desa/Lurah menyangkut tentang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa dan kepala desa berwenang untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, dan dengan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, jelas memberikan beban yang cukup untuk kepala desa, selain itu kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dari hasil penelitian dilapangan, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, belum memiliki aturan tertulis seperti peraturan Desa ataupun peraturan kepala desa mengenai keamanan dan ketertiban. selama ini masalah keamanan biasanya ditangani secara kekeluargaan dan oleh pihak kepolisian, hasil penelitian dilapangan menunjukkan pentingnya suatu aturan yang mengikat di masyarakat, agar supaya ada tindakan lebih dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di desa, serta adanya tindakan yang tegas dari pihak pemerintah desa karena sudah mempunyai payung hukum yang mengikat selain dari hukum yang sudah berlaku selama ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta

Perlindungan Masyarakat Bagian Kedu Pasal 3

- (2) Kepala Desa/Lurah melalui satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan ketentuan Perundang-undangan.

Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, mengkombinasi atau mensinergikan, dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan.

Pada pengembangan model tersebut dapat diketahui model mental para pakar dan implementor bersama kelompok sasaran kebijakan minimal berdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi kebijakannya.

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:

1. Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlu-nya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis.
3. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah.

4. Pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

Ripley dan Franklin (1986: 11) memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik dengan fokus perhatian pada upaya membangun kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan dalam suatu organisasi. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut keduanya, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni:

1. Banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan.
2. Adanya program yang tidak didesain dengan baik. Sedangkan perspektif faktual mengasumsikan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Dengan demikian, kepatuhan pelaksana terhadap atasan perlu ditunjukkan sebagai bukti keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil).

Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur

pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

4.3.2 Adanya upaya kebijakan yang ditetapkan untuk masyarakat Kelurahan Pekan Dolok Masihul

Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.

1. Kewenangan/ Struktur Birokrasi Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik Afandi & Warjio (2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata

kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.

2. Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku (Wardhani, Hasiolan, & Minarsih, 2016). Winarno (2012) Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Afandi & Warjio, (2015) Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan.

Ramdhani & Suryadi (2005) Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman konsensus

yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbagun dapat meningkatkan kinerja personal dalam bekerja dengan menemukan kondisi win-win solution pada setiap permasalahan.

3. Efektivitas, Dunn (2003) Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan public.
4. Efisiensi, Dunn (2003) Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya.

4.3.3 Adanya pemberdayaan masyarakat dalam ketentraman Kelurahan Pekan Dolok masihul

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan wujud demokrasi melalui desentralisasi. Jadi konsekuensinya adalah otonomi daerah. Dengan ini diharapkan pemerintah daerah dan DPRD membuat kebijakan daerah

yang berorientasi partisipatif kerakyatan (Republik Indonesia, 2004).

Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sehingga dapat berdaya guna. Agar pemberdayaan berlangsung dan berhasil tidak hanya diperlukan partisipasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja, akan tetapi kita harus membangun manusianya pula supaya mampu menyesuaikan pikiran dan tindakannya dengan perkembangan yang terjadi dan memiliki rasa tanggung jawab serta ikut memelihara hasil-hasil atau upaya yang telah dilaksanakan.

Djohani (2003) Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport (1984), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Tujuan dari pemberdayaan Sulistiyani (2004) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Arnstein (1969) Kebijakan partisipatif kerakyatan yang dituangkan dalam

bentuk peraturan daerah harus menjamin keadilan dalam masyarakat. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, sejalan dengan kebijakan pemerintah serta didukung sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga muncul pola pikir top-down dan bottom-up yang berhubungan satu sama lain dalam hal kebutuhan dan berdampak pada kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat. Maksud dan tujuan otonomi daerah adalah:

1. Peningkatan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Perkembangan kehidupan demokrasi.
3. Distribusi layanan yang lebih baik.
4. Menghormati budaya local
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman wilayah.

Untuk menghormati budaya lokal, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengangkat Mapalus sebagai budaya lokal melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Mapalus untuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Lingkungan Kelurahan Pekan Dolok Masihul:

1. Sebagai pelaku yaitu masyarakat sendiri yang akan memainkan peran utama dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, serta peran pemerintah Kelurahan lebih merupakan pelengkap dan penunjang termasuk menentukan aturan dasar kegiatannya. Bagi pemerintah kelurahan, dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai suatu proses belajar usaha melalui proses evaluasi terhadap segala hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan usaha, serta mempelajari berbagai kendala yang dihadapi. Peran masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Pekan Dolok Masihul dapat di kategorikan baik.

2. Sebagai partisipan yaitu partisipasi sosial mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengusahakan penyusunan kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme dari bawah ke atas dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subyek pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu. Peran masyarakat sebagai partisipan dapat dikategorikan baik.
3. Sebagai peserta, yaitu keterlibatan masyarakat dan aktif dalam kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Harapannya bagi masyarakat dan lingkungan kelurahan Pekan Dolok Masihul kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Peran masyarakat sebagai peserta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan Pekan Dolok Masihul dapat di kategorikan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula terbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuannya yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Kebijakan adalah Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsistensi dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Pemberdayaan masyarakat sebagai proses di mana orang atau sekelompok orang secara aktif dan terlibat dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi dan mampu membuat keputusan dalam menghadapi berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan mereka untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam perencanaan, pengembangan dan pemberian layanan serta mengambil tindakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Lingkungan Kelurahan Pekan Dolok Masihul:

1. Sebagai pelaku yaitu masyarakat sendiri yang akan memainkan peran utama dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, serta peran pemerintah Kelurahan lebih merupakan pelengkap dan penunjang termasuk menentukan aturan dasar kegiatannya. Bagi pemerintah kelurahan, dalam

kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai suatu proses belajar usaha melalui proses evaluasi terhadap segala hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan usaha, serta mempelajari berbagai kendala yang dihadapi. Peran masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Pekan Dolok Masihul dapat di kategorikan baik.

2. Sebagai partisipan yaitu partisipasi sosial mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengusahakan penyusunan kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme dari bawah ke atas dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subyek pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu. Peran masyarakat sebagai partisipan dapat dikategorikan baik.
3. Sebagai peserta, yaitu keterlibatan masyarakat dan aktif dalam kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Harapannya bagi masyarakat dan lingkungan kelurahan Pekan Dolok Masihul kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Peran masyarakat sebagai peserta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan Pekan Dolok Masihul dapat di kategorikan baik.

5.2 Saran

Adapun saran dari peneliti Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak pemerintah Kelurahan Pekan Dolok Masihul kecamatan Dolok Masihul lebih memperhatikan masyarakat lingkungan tersebut terutama program ketentraman dan ketertiban masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman dan terjaga dari lingkungan yang kurang nyaman, sehingga harus segera dan tingkat membangun pos kamling disetiap lingkungan.
2. Agar Pemerintah Kelurahan Pekan Dolok Masihul lebih giat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat Kelurahan Pekan Dolok Masihul terutama dalam program kegiatan ketentraman lingkungan masyarakat kelurahan Pekan Dolok Masihul dalam mengupayakan ada Pos Kampling di setiap lingkungan Kelurahan Pekan Dolok Masihul.
3. Diharapkan agar nantinya target yang telah ditentukan tersebut dapat benar-benar memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas dan kapabilitas dengan program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G, S. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Mahardika, A., & Rizki, R. N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647–1654.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Munawar, N. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rochyani Naditya, Agus Suryono, M. R. (2010). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (Dkp) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (Bsm) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1–13.
- Sabtimarlia. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambi Di Dusunsambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. 1–196.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*

dan R & D.

- Suharto, E. (2015). *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pengkajian Sosial*. Refika Aditama.
- Syahida, Agung, B. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). *Journal Pemerintahan Integratif*, 3(1), 1–10.
- Syamsi, I., & Westra, P. (1982). *Ensiklopedia Administrasi : (edisi yang dieprbaiki dari kamus administrasi)* (5th ed.). Gunung Agung.
- Syaukani. (2015). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Utara, B. M. (2014). *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitang Dua Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (2nd ed.). Media Pressindo.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (T. Admojo (ed.); revisi). CAPS.
- Yusriati. (2016). *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Studi Komparatif Perilaku Keagamaan Peserta Didik SMA Swasta Jawa Barat*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi







UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1283/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 01 Shafar 1444 H
29 Agustus 2022 M

Kepada Yth : **Lurah Kelurahan Pekan Dolok Masihul**
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD ALWI HILMI**
N P M : 1803100031
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL KECAMATAN
DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan-I



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN. 0111117804



Cc : File.





**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN DOLOK MASIHUL
KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 97-A Kel.Pekan Dolok Masihul Kode Pos : 20991

Dolok Masihul, 01 Agustus 2022

Nomor : 18.44.1/420.13/150 /2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : *Balasan Surat Izin Penelitian*

Kepada Yth :
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU)
di -
Tempat

Menindak lanjuti surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 1283/KET/II.3AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dapat kami terangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ALWI HILMI
N P M : 1803100031
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten
Serdang Bedagai

Telah melakukan penelitian di Kantor Lurah Pekan Dolok Masihul pada tanggal 31 Agustus 2022

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

LURAH PEKAN DOLOK MASIHUL



HUSNUL ARIFIN, SH
NIP. 196612101989091003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 30 Mei 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MUHAMMAD ALWI HILMI
NPM : 1203100031
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 142 sks, IP Kumulatif 3,47

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	acc 30 mei 2022
2	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL	
3	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 30 Mei 2022

Ketua,

(AMANDA MAHARDIKA, S.SOS.) M.SP
NIDN: 0122110801

Pemohon

058

(MUHAMMAD ALWI HILMI)

PB: SYAFERUDDIN M.H

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

(SYAFERUDDIN, S.SOS., M.H)
NIDN: 0130056601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 806/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **30 Mei 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **MUHAMAMD ALWI HILMI**
N P M : 1803100031
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHLU KECAMATAN
DOLOK MASIHLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pembimbing : **SYAFRUDDIN., S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 058.18.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Mei 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 08 Dzulqaidah 1443 H
08 Juni 2022 M



Dr. Arifan Saleh., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 19 JULI2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MUHAMMAD ALWI HILMI
N P M : 1803100031
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KESIAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL KECAMATAN DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(SYAFRUDIN, S.SOS.,M.H)

Pemohon,

(MHD - ALWI HILMI)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 1095/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	AZIRA WAHYU ARMANDA	1803100067	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA SUKA
7	ANDRE FARSYA ANDORIA	1803100014	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PENGARUH ROTASI PEGAWAI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PT. PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA KANWIL I MEDAN
8	ABDUL RAUF ALBATASJI	1803100059	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KECAMATAN BABALAN
9	MUHAMMAD ALWI HILMI	1803100031	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
10					

Medan, 21 Dzulhijjah 1443 H
20 Juli 2022 M
a.n. Dekan,
Wakil Dekan-III
(Drs. Hj. YURISMA TANJUNG, MAP.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-20 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : MUHAMMAD ALWI HILMI
NPM : 1803100031
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN PEKAN DOLOK MASIHUL KECAMATAN DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	24.7.22	- Nomor halaman dibuat pada kanan atas - Isi latar belakang Fakultas pada satu paragraf saja.	
2.	26.7.22	- Uraian masalah dan daftar Pustaka dan Bab - II	
3.	28.7.22	- Pada metode penulisan Bab. III dibuat deskripsi singkat lokasi penelitian dan gbr Bagan struktur organisasi	
4.	1.8.22	- Acc Bab. I, II dan III	
5.	20.8.22	- Buat tabel distribusi dari sumber pada Bab IV - Halaman 42 dan 43 dituliskan	
6.	22.9.22	- Rubah judul Bab V. - simpulan harus diambil dari hasil penelitian dan pembahasan - saran merupakan Rekomendasi yang harus diberikan	
7.	28.9.22	Uraian Uraian skripsi (CV, SK, - 5 surat balasan dll)	
8.	1.10.22	Acc Pemb. skripsi siap untuk diuji dalam sidang sidang Hijau	

Medan, ..21..10.....2022..

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

Dr. ARIEN SALEH, S.Sos, M.SP

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.P.Sy, A.F.R.U.K.I.A., S.Sos, M.H

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 1469/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 07 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	MUHAMMAD ALWI HILMI	1803100031	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASHUL KECAMATAN DOLOK MASHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
12	NOVRIANSYAH HARAHAP	1803100047	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG
13	RAHMAD KURNIAWAN	1803100012	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 7 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WIRUSAHA MASYARAKAT DI DESA PADANG BULAN KECAMATAN KOTANOPAN
14						
15						

Medan, 09 Rabiul Awwal 1444 H
05 Oktober 2022 M

Ditetapkan oleh :
A.n. Rektor
Majelis Rektori
PROF. DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,
DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian
Sekretaris
DR. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MUHAMMAD ALWI HILMI
Tempat/Tanggal Lahir : Dolok Masihul, 03 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Lingk, VII Kel. Pekan Dolok Masihul
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : ARWINSYAH ARA
Ibu : WAHYUNI

Riwayat Pendidikan :

1. Tamat Dari SD Negeri No. 102071 Dolok Masihul Tahun 2012, Berijazah
2. Tamat Dari SMP Negeri 1 Dolok Masihul Tahun 2015, Berijazah.
3. Tamat Dari SMA Negeri 1 Dolok Masihul 2018, Berijazah.
4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administras Publik Tahun 2018 – Sekarang.

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.